

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA SEMESTER 2 TAHUN 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.01



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2022

Jl. Raya Sentani - Waena
Telp. (0967) 574160 - (0967) 571216

Jayapura - Papua

e-mail: ptun.jayapura@gmail.com

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan dapat dipisahkan dalam bagian yang tidak pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuklaporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem

penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (disposal).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk periode Semester II Tahun 2022 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Jayapura, 10 Januari 2023 Kuasa Pengguna Barang



FEFI YANTI THOMAS, S.E. NIP. 197903102006042002

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
3.1.1. Tanah	7
3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	9
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	10
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	14
4.2.2. Barang Persediaan	15
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	16
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	16

V.	Kendala dan Saran	17
5	5.1. Kendala	17
	5.2. Saran	17
VI.	Penutup	18
Lampir	an	
	A. Catatan Ringkas Barang Milik Negara	
	B. Laporan Barang Intrakomptabel	
	C. Laporan Barang Ekstrakomptabel	
	D. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	
	E. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan	
	F. Laporan Aset Tak Berwujud	
	G. Laporan Barang Bersejarah	
	H. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik	
	I. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca	

J. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

- 1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dai APBN tertapi sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah)
- 2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
- 3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntasi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset

lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkan pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan menggunakan Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI.

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

a. Ketaatan, yaitu Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.

- yaitu Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI b. Konsistensi, dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kemampubandingan, yaitu Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Kelengkapan, yaitu Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI.

II. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 3. Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 10. Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang
 Milik Negara;
- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal
 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan
 Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- 16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik

Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan *Modul Aset Tetap dam Modul Persediaan Aplikasi SAKTI* tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data (ADK Backup) SIMAK-BMN dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi intenal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat

satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementrian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2022 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebesar Rp. 30.839.272.907 dengan rincian sebagai berikut:

NAMA ASET	NILAI RUPIAH
Persediaan	1.218.500
Tanah	14.099.581.000
Mesin	3.529.250.126
Gedung dan Bangunan	18.635.628.544
Aset Tetap Lainnya	2.683.400
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	68.750.000
Akumulasi Penyusutan Mesin	(2.868.791.428)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.560.674.235)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(68.750.000)

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	917.791.058
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(917.414.058)
Total	30.839.272.907

Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN Semester I TA 2022 dengan Semester II TA 2022.

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA SEMESTER I TAHUN 2022 DAN SEMESTER II TAHUN 2022

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

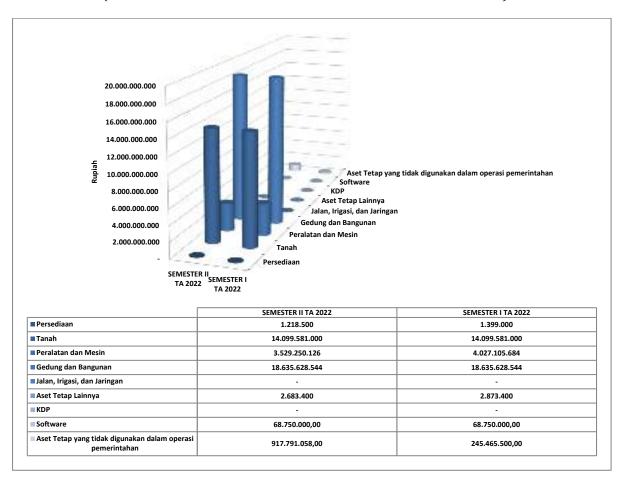
NAMA ASET	SEMESTER I TA 2022	SEMESTER II TA 2022
Persediaan	1.399.000	1.218.500
Tanah	14.099.581.000	14.099.581.000
Peralatan dan Mesin	4.027.105.684	3.529.250.126
Gedung dan Bangunan	18.635.628.544	18.635.628.544
Aset Tetap Lainnya	2.873.400	2.683.400
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.411.594.687)	(2.868.791.428)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.353.611.561)	(2.560.674.235)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0

Software	68.750.000	68.750.000
Akumulasi Penyusutan Software	(68.750.000)	(68.750.000)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	245.465.500	917.791.058
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(245.465.500)	(917.414.058)
Total	31.001.381.380	30.839.272.907

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

SEMESTER I TAHUN 2022 DAN SEMESTER II TAHUN 2022

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

- a. Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai.
- b. Nilai Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah sebesar Rp. 497.855.558,- sehingga nilai per 31 Desember 2021 menjadi Rp. 3.529.250.126,- dengan mutasi kurang sebesar Rp. 497.855.558,-
- c. Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai.
- d. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah sebesar Rp 190.000,- sehingga nilai per 31 Desember 2022 menjadi Rp. 2.683.400,- dengan mutasi kurang sebesar Rp. Rp 190.000,-
- e. Nilai Software pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai.
- f. Nilai Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2022 mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar Rp. 672.325.558,- sehingga nilai per 31 Desember 2022 menjadi Rp. 917.791.058,- dengan mutase tambah sebesar Rp. 672.325.558,-

4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester I tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah sebesar Rp. 9.870.850 sehingga nilai per 30 Juni 2022 menjadi Rp. 19.384.250,- .

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
SEMESTER I TAHUN 2022 DAN SEMESTER II TAHUN 2022

PERSEDIAAN	SMT I TAHUN 2022	SMT II TAHUN 2022
Barang Konsumsi	1.386.000	1.218.500
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	13.000	0

Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk	0	0
dijual atau diserahkan kepada		
masyarakat		
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

4.2.3 KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2022 tidak mengalami perubahan nilai..

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2022 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

SEMESTER II TAHUN 2022

NAMA ASET	UAKPA	UAKPB
Persediaan	1.218.500	1.218.500
Tanah	14.099.581.000	14.099.581.000
Peralatan dan Mesin	3.529.250.126	3.529.250.126
Gedung dan Bangunan	18.635.628.544	18.635.628.544

Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	2.683.400	2.683.400
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.868.791.428)	(2.868.791.428)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.560.674.235)	(2.560.674.235)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(0)	(0)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Software	68.750.000	68.750.000
Akumulasi Penyusutan Software	(68.750.000)	(68.750.000)
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	917.791.058	917.791.058
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(917.414.058)	(917.414.058)
Total	30.839.272.907	30.839.272.907

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

5.2. SARAN

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II Tahun 2022 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementrian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester II Tahun Anggaran 2022 dapat dipertahankan dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya di bidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

LAMPIRAN I CATATAN RINGKAS BARANG MILIK NEGARA

LAMPIRAN II LAPORAN BARANG INTRAKOMPTABEL

LAMPIRAN III LAPORAN BARANG EKSTRAKOMPTABEL

LAMPIRAN IV

LAPORAN BMN GABUNGAN

INTRAKOMPTABEL DAN

EKSTRAKOMPTABEL

LAMPIRAN V LAPORAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

LAMPIRAN VI LAPORAN ASET TAK BERWUJUD

LAMPIRAN VII LAPORAN ASET BARANG BERSEJARAH

LAMPIRAN VIII LAPORAN PERSEDIAAN DAN BERITA ACARA OPNAME FISIK

LAMPIRAN IX LAPORAN POSISI BMN DAN KEUANGAN PADA NERACA

LAMPIRAN X BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA BAGIAN ANGGARAN 005.01 SEMESTER III TAHUN 2022

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
- 13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester II Tahun Anggaran 2022.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini adalah sebesar Rp. 30.839.272.907 (tiga puluh milyar depalan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan

sebesar Rp. 31.001.381.380 (tiga puluh satu milyar satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama Semester II Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 162.108.473 (seratus enam puluh dua juta serratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

- 1. Neraca;
- 2. Laporan Barang Persediaan;
- 3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
- 4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- 5. Laporan Aset Tak Berwujud;
- 6. Laporan Barang Bersejarah;
- 7. Laporan Kondisi Barang;
- 8. Laporan Penyusutan;
- 9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- 11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
- 12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
- 13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SAKTI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- 14. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
- 15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara Semester II Tahun 2022

1. Saldo Awal Semester II TA 2022

Nilai BMN per 01 Juli 2022 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Rp. 37.035.613.147 (tiga puluh tujuh milyar tiga puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu serratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 37.010.654.128 (tiga puluh tujuh milyar sepuluh juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 24.959.019 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu Sembilan belas rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN Semester II tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 1.218.500** (satu juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 1.399.000** (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan mutasi kurang persediaan selama periode laporan sebesar **Rp. 180.500** (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	1.386.000	(167.500)	1.218.500
Bahan Untuk Pemeliharaan	13.000	(13.000)	0
Persediaan Lainnya	-		-
Jumlah	1.399.000	180.500	1.218.500

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 adalah sebesar Rp. **14.099.581.000** (empat belas milyar sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 5.300 m² dengan nilai sebesar Rp. **14.099.581.000** (empat belas milyar sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah), mutasi kurang 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Mutasi tambah Tanah tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Intrakomptabel (Rupiah)
Mutasi kurang Ta	anah tersebut meliputi:	
Jns. Tran.	Uraian	Intrakomptabel (Rupiah)

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 3.529.250.126** (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 4.027.105.684** (empat milyar dua puluh

tujuh juta serratus lima ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), mutasi kurang sebesar Rp. 497.855.558 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

1) Alat Angkut (3.02)

Saldo Alat Angkut pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 961.671.000 (sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 961.671.000 (sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Angkut tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
Mutasi Kura	ng Alat Angkut tersel	but meliputi:	
Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Dari jumlah Alat Angkut di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	18	945.371.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	2	16.300.000

2) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.004.907.646 (satu milyar empat juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 1.394.492.891 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ratus ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah), mutasi sebesar Rp. 389.585.245 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	rusak	389.585.245	

Dari jumlah Alat Kantor di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	325	1.004.907.646
Rusak Ringan		
Rusak Berat	235	389.585.245

3) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 adalah sebesar Rp. 443.752.000 (empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 463.194.002 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 19.442.002 (sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua rupiah).

Mutasi Tambah Alat Studio, komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Alat Studio tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	rusak	19.442.002	

Dari jumlah Alat Studio di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)

Baik	25	443.752.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	12	19.442.002

4) Alat Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kesehatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 0** (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 600.000** (enam ratus ribu rupiah), mutasi kurang sebesar **Rp. 600.000** (enam ratus ribu rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Alat Kedokteran tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Rusak	600.000	

Dari jumlah Alat Kedokteran di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	2	600.000

5) Komputer dan Peralatan Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 1.102.171.480** (*satu milyar seratus dua juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 1.175.624.790** (*satu milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*), mutasi kurang sebesar **Rp. 73.453.310** (*tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah*).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	rusak	73.453.310	

Dari jumlah Komputer di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (F	Rp)
Baik		71	1.102.171.480
Rusak Ringan		0	0
Rusak Berat		15	73.453.310

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
			Penyusutan	
1.	3.01 Alat Angkutan Bermotor	945.371.000	(945.371.000)	0
2.	3.02 Alat Pengolahan	32.450.000	(32.450.000)	0
3.	3.03 Alat Kantor	181.719.386	(168.291.386)	13.428.000
4.	3.04 Alat Rumah Tangga	823.188.260	(758.420.760)	64.767.500
5.	3.05 Alat Studio	94.752.000	(70.981.400)	23.770.600
6.	3.06 Peralatan Pemancar	349.000.000	(87.250.000)	261.750.000
7.	3.07 Komputer Unit	941.944.880	(682.830.605)	259.114.275
8.	3.08 Peralatan Komputer	160.226.600	(122.598.277)	37.628.323
9.	3.09 Peralatan Olahraga	598.000	(598.000)	0
	Total	3.529.250.126	(2.868.791.428)	660.458.698

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semeseter II Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 16.074.954.309** (enam belas milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 16.282.016.983** (enam belas milyar dua ratus delapan puluh dua juta enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), mutasi kurang sebesar **Rp. 207.062.674** (dua ratus tujuh juta enam puluh dua ribuenam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung Tempat Kerja (4.01)

Saldo Bangunan Gedung (Tempat Kerja dan Tempat Tinggal) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 14.069.268.551 (empat belas milyar enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 14.226.742.546 (empat belas milyar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), mutasi kurang sebesar Rp. 157.473.995 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Mutasi Tambah Gedung tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Gedung tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Penyusutan	157.473.995	

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2	14.069.268.551
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

2) Bangunan Gedung Tempat Tinggal (4.04)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 adalah sebesar **Rp 1.841.770.820** (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.

1.889.017.857 (satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), mutasi kurang sebesar Rp. 47.247.037 (empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Penyusutan	47.247.037	

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Tinggal di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (I	Rp)
Baik		6	1.841.770.820
Rusak Ringan		0	0
Rusak Berat		0	0

3) Tugu/Tanda Batas (4.04)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 adalah sebesar **Rp 163.914.938** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 166.256.580** (seratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah), mutasi kurang sebesar **Rp. 2.341.642** (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).

Mutasi Tambah Tugu/Tanda Batas tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Tugu/Tanda Batas tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
	Penyusutan	2.341.642	

Dari jumlah Tugu/Tanda Batas di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp))
Baik		1	163.914.938
Rusak Ringan		0	0
Rusak Berat		0	0

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
			Penyusutan	
4.	.01 Bangunan Gedung Kerja	15.747.399.544	(1.678.130.993)	14.069.268.551
4.	.02 Bangunan Gedung Tinggal	2.698.556.000	(856.785.180)	1.841.770.820
4.	.03 Tugu/Tanda Batas	189.673.000	(25.758.062)	163.914.938
	Total	18.635.628.544	(2.560.674.235)	16.074.954.309

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 2.683.400** (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 2.873.400** (dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar **Rp. 190.000** (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

1) Bahan Perpustakaan Tercetak (5.03)

Saldo Instalasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 2.683.400** (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 2.873.400** (dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar **Rp. 190.000** (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Mutasi Tambah Instalasi tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
Mutasi Kurang II	nstalasi tersebut meliputi:		
	Unalara	Nile Land on the Life A	and the last of the last
Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Dari jumlah Instalasi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)	
Baik		18	2.683.400
Rusak Ringan		0	0
Rusak Berat		2	190.000

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku
			Penyusutan	
5.01	Bahan Perpustakaan Cetak	2.873.400	(190.000)	2.683.400
Tot	tal	2.873.400	(190.000)	2.683.400

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 2.683.400** (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 2.873.400** (dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar **Rp. 190.000** (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

1) Bahan Perpustakaan Tercetak (6.01)

Saldo Instalasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 2.683.400** (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 2.873.400** (dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar **Rp. 190.000** (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan Tercetak tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan Tercetak tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
		Rp. 190.000	

Dari jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)	
Baik		18	2.683.400
Rusak Ringan		0	0
Rusak Berat		2	190.000

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan		Nilai Buku
			Penyusutan	
1. 6.01 Bahan Perpustakaan Cetak		2.873.400	(190.000)	2.683.400
	Total	2.873.400	(190.000)	2.683.400

f. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan/ BMN yang dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan/ dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 adalah sebesar Rp. 917.791.058 (sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh delapan rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 245.465.500 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 672.325.558 (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

Mutasi Tambah BMN yang Dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai (Rp)

Rp. 672.325.558

Mutasi Kurang BMN yang Dihentikan Penggunaannya dalam Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Rincian BMN yang Dihentikan penggunannya dalam Operasional Pemerintahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 per golongan barang adalah sebagai berikut :

No.	Golongan Barang	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	16.300.000	0
2	Alat Bengkel Tak Bermesin	760.000	98.000
3	Alat Pengolahan	11.795.001	1
4	Alat Kantor	88.459.732	6.836.000
5	Alat Rumah Tangga	375.289.513	5.452.008
6	Alat Studio	4.950.000	0

7	Alat Komunikasi	13.492.002	10.010
8	Peralatan Pemancar	13.875.500	0
9	Unit Alat Laboratorium	52.290.000	0
10	Komputer Unit	268.531.500	0
11	Peralatan Komputer	71.437.810	72.000
12	Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat	20.000	0
13	Peralatan Olahraga	400.000	0
14	Bahan Perpustakaan Tercetak	190.000	0

Akumulasi Penyusutan BMN yang Dihentikan penggunannya dalam Operasional Pemerintahan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	BMN yang Dihentikan Penggunannya dalam Operasional Pemerintahan	930.259.077	(929.882.077)	377.000
	Total	930.259.077	(929.882.077)	377.000

g. Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan.

Saldo Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 68.750.000** (enam puluh delapan juta tujuh ratu lima puluh ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 68.750.000** (enam puluh delapan juta tujuh ratu lima puluh ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

1) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 68.750.000** (enam puluh

Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

delapan juta tujuh ratu lima puluh ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 68.750.000** (enam puluh delapan juta tujuh ratu lima puluh ribu rupiah), mutasi tambah sebesar **Rp. 0** (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar **Rp. 0** (nol rupiah).

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
Mutasi Kurang Aset	Tak Berwujud terseb	ut meliputi:	

Nilai Intrakomptabel (Rp)

h. Konstruksi dalam Pengerjaan

Jns. Tran.

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0) (nol rupiah).

Mutasi Tambah Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai (Rp)

Mutasi Kurang Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai (Rp)

i. Barang Bersejarah

Saldo Barang Bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0) (nol rupiah). Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II Tahun 2022 adalah sebanyak 0 unit.

3. Barang Milik Negara

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 30.839.272.907 (tiga puluh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya, Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, Aset Tak berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL	GABUNGAN	
		RP.	% RP.	% RP.	%
	Aset Lancar				
	Persediaan	1.218.500		1.218.500	
	Sub Jumlah	1.218.500		1.218.500	
	Aset Tetap				
	Tanah	14.099.581.000	0	14.099.581.000	
	Peralatan dan Mesin	3.529.250.126	12.491.000	3.541.741.126	
	Gedung dan Bangunan	18.635.628.544	0	18.635.628.544	
	Aset Tetap Lainnya	2.683.400	0	2.683.400	
	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0	
	Sub Jumlah	36.267.143.070	0	36.279.634.070	
	Aset Lainnya				
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	
	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	68.750.000	0	68.750.000	

Aset dihentikan penggunaan operasional pemerintah	917.791.058	12.468.019	930.259.077
Total	37.254.902.628	24.959.019	37.279.861.647

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTAE	BEL	GABUNGAN	
	RP.	% RP.	%	RP.	%
Aset Tetap					
Peralatan mesin	(2.868.791.428)	(12.491	.000)	(3.339.420.576)	
Gedung dan Bangunan	(2.560.674.235)			(1.740.912.488)	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0			(9.710.000)	
Aset Tetap Lainnya	0		0	0	
Aset Lainnya	0		0	0	
Aset Tak berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	(68.750.000)		0	0	
Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	(917.414.058)	(12.468	.019)	(155.181.500)	
Total	(6.415.629.721)	(24.959	.019)	(6.440.588.740)	

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester I tahun 2022 per akun neraca adalah sebagai berikut :

NAMA ASET	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
Persediaan	1.218.500	1.218.500	0
Tanah	14.099.581.000	14.099.581.000	0
Peralatan dan Mesin	3.529.250.126	3.529.250.126	0
Gedung dan Bangunan	18.635.628.544	18.635.628.544	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.868.791.428)	(2.868.791.428)	0
Aset Tetap Lainnya	2.683.400	2.683.400	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.560.674.235)	(2.560.674.235)	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	917.791.058	917.791.058	0
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	68.750.000	68.750.000	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(917.414.058)	(917.414.058)	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(68.750.000)	(68.750.000)	0
Total	30.839.272.907	30.839.272.907	0

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakpmptabel dan ekstrakomptabel) selama periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

NO	PERIODE	NILAI BMN	PERKEMBANGAN

PELAPORAN	RP.	RP.	%.
1 30/06/2022	31.001.381.380	(350.248.822)	(1,1)

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN
		RP.	RP.
1	Tanah	14.099.581.000	
2	Peralatan dan Mesin	3.529.109.696	140.430.000
3	Gedung dan Bangunan	18.635.628.544	
4	Aset Tetap Lainnya	2.683.400	
5	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	68.750.000	
6	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	917.791.058	
	Jumlah	37.253.543.698	140.430.000

Keterangan tambahan:

1. Sudah diajukan pengajuan PSP BMN pada tanggal 16 Desember 2022 senilai Rp. 140.430.000 yang terdiri dari 2 unit P.C, 7 unit Laptop dan 2 unit Printer

b. Pengelolaan BMN

NO	URAIAN	PENGGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAHTANGANAN	PENGHAPUSAN	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna					

	barang
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengelola barang
3	Dalam proses pengelola barang
4	Selesai di pengelola barang
	a.Dikembalikan
	b. Ditolak
	c.Disetujui
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
6	Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang
9	Selesai Serah Terima
Dala	am proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses pengelolaan yang

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses pengelolaan yang gagal/batal dilaksanakan, dengan rincian debagai berikut :

1.

2.

C. Pengelolaan BMN Idle

NO URAIAN JUMLAH

1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle
2	Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola
4	Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna
5	Selesai serah terima kepada pengelola
	Keterangan tambahan :
	1
	2

3. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0. Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 0. BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:

NO	PERKIRAAN NERACA	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU
1			
2			
3			

b. Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang

Nilai BMN dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0. Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 0. BMN tersebut telah dikeluarkan dari

penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 dan disajikan sebagai Daftar Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERKIRAAN NERACA	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU
1			
2			
3			

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN :

1.	
2.	

5. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN , langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1.	
3.	

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Semester II tahun 2022 Kuasa Pengguna Barang



FEFI YANTI THOMAS, S.E NIP. 19790310 200604 2 002